

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFESIENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2010-2016**
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)

Endi Rustendi
Universitas Islam '45' Bekasi
endirustendi8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak Daerah di Kabupaten Bekasi Tahun 2010-2016, untuk mengetahui tingkat efesiensi penerimaan pajak Daerah di Kabupaten Bekasi Tahun 2010-2016, untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010-2016. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan penerimaan pajak Daerah dan analisis secara kuantitatif penerimaan pajak Daerah di Kabupaten Bekasi yang terdiri dari efesiensi (*efficiency*), efektivitas (*effectivity*) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumentasi, sedangkan analisis deskriptif dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan pajak Daerah dan pendapatan asli daerah, sedangkan analisis kuantitatif dalam perhitungan rumus perpajakan dipergunakan untuk mengetahui penerimaan pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010 sampai dengan 2016.

Hasil perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak Daerah dengan potensi/target Pajak Daerah. Berdasarkan hasil tersebut tingkat efektifitas penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata prosentase yaitu 114,28% dengan kategori sangat efektif. Tingkat efesiensi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan biaya pemungutan dengan realisasi pajak Daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata prosentase yaitu 44,51 % dengan kategori cukup efisien. Kontribusi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan realisasi pajak Daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata prosentase yaitu 0,74 % dengan kategori sangat kurang.

Kata Kunci : Efektifitas, Efesiensi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness of regional tax revenues in Bekasi Regency in 2010-2016, to determine the level of efficiency of regional tax revenues in Bekasi Regency in 2010-2016, to determine the contribution of regional tax revenues to Bekasi District's Original Revenue in 2010-2016. This research is descriptive research, descriptive method in this study is used to describe the regional tax revenue and quantitative analysis of regional tax revenue in Bekasi Regency which consists of efficiency (efficiency), effectiveness (effectivity) and its contribution to the original revenue of Bekasi Regency in 2010 to with 2016. The technique of collecting data by interview, documentation study, while descriptive analysis is used to obtain an overview of regional tax revenues and local revenue, while quantitative analysis in calculating the tax formula is used to determine the regional tax revenue managed by the Regional Revenue Service of Bekasi Regency budget year 2010 to 2016.

The results of the calculation of effectiveness are done by comparing the realization of regional tax collection with the potential / target of regional taxes. Based on these results, the effectiveness of Bekasi Regency Regional Tax revenues in 2010 up to 2016 shows an average percentage of 114.28% with a very effective category. The level of efficiency of Regional tax revenues in 2010-2016 in Bekasi Regency by comparing the costs of collection with the realization of Regional taxes. From this calculation, it can be seen in 2010 to 2016 showing the average percentage of 44.51% with the category quite efficient. Contribution of Regional tax revenue in 2010-2016 in Bekasi Regency by comparing the realization of Regional tax with local revenue. From this calculation, it can be seen from 2010 to 2016 showing the average percentage of 0.74% with very less categories.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Regional Taxes, Local Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Endi Rustendi

Kesejahteraan masyarakat banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Untuk meningkatkan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu pula halnya Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Bekasi diharapkan Kabupaten Bekasi mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Bekasi, nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah

Dalam membiayai pembangunan, salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Jenis-Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, sebagai berikut: pajak hotel, pajak restoran, pajak Daerah, pajak reklame, pajak

Endi Rustendi

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta pajak BPHTB.

Dari uraian diatas dan dalam kaitanya dengan judul penelitian ini, maka permasalahanya akan dibatasi pada analisis efektivitas, efesiensi, dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi).

Tujuan Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan hasil yang diharapkan setelah proses penelitian dilaksanakan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui tingkat efesiensi penerimaan pajak Daerah.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- a. Pajak Daerah
 - 1) Pajak Provinsi

Endi Rustendi

2) Pajak Kabupaten/ Kota

b. Retribusi Daerah, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Prakosa (2005:2), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah menurut Prakosa (2005:77) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pajak Propinsi, terdiri dari:

1) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/ Kota

1) Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran.

3) Pajak Daerah.

4) Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

7) Pajak Parkir.

Efisiensi

Pengertian efisiensi didefinisikan oleh banyak pakar ekonomi dan manajemen, diantaranya adalah pengertian Efisiensi menurut Hasibuan (1994:7) yaitu Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Menurut Supriyono (1997:35) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Manajemen II” mendefinisikan efisiensi adalah jika suatu unit dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efisiensi pajak Daerah merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur hasil realisasi pajak Daerah untuk menutup biaya pemungutan yang bersangkutan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau pengelolaan pajak Daerah dengan besarnya realisasi penerimaan pajak Daerah.

Biaya Pemungutan

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2002:130)

Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi penggunaan kata efisiensi lekat

Endi Rustendi

dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Robbins dalam Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mardiasmo (2004:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan/sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut H. Emerson yang dikutip oleh Hasibuan (2004:242) menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target pajak Daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\%$$

Target Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Potensi Rill Daerah

Sumber : Simanjuntak dalam Halim (2004:93)

Kontribusi

“Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maksudnya adalah keikutsertaan, keterlibatan melibatkan diri maupun sumbangan, dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi ataupun tindakan (Wikipedia. 2016. Kontribusi. Diakses dari <http://id.wikipedia.org>)”. Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) “ Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Dan Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan “Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” Dalam rumusan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi disini adalah sumbangan, iuran atau sokongan yang diberikan oleh pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Untuk menghitung sumbangan dari penerimaan pajak Daerah terhadap pajak daerah dan sumbangannya terhadap Pendapatan Asli Daerah, menurut Syafri Daud dalam Halim (2002:163) digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

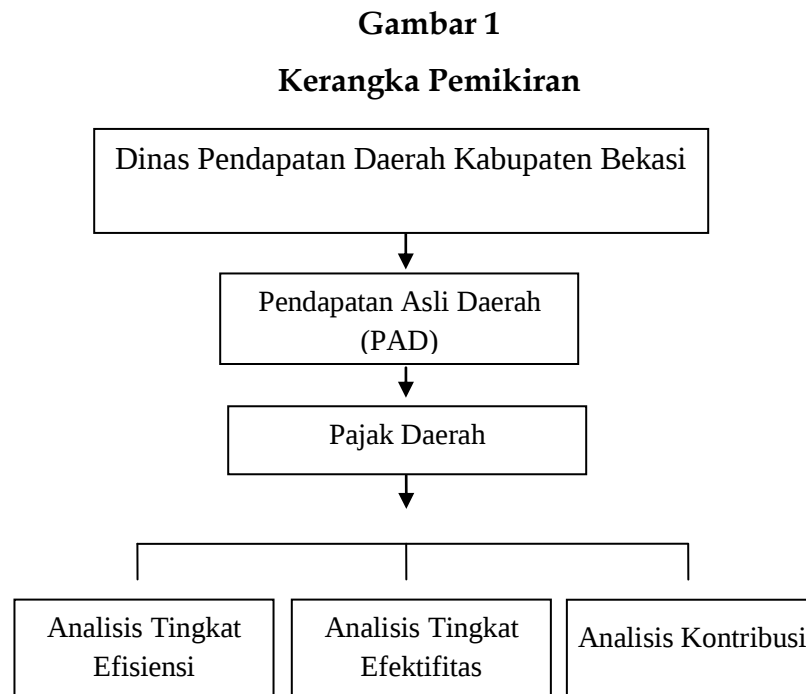
Sumber : Abdul Halim (2004:164)

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas dan efisiensi pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bekasi. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah

mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak Daerah.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Adapun yang menjadi obyek pajak dalam penelitian ini adalah pajak Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak Daerah dijelaskan bahwa setiap penyelenggaraan Daerah dengan dipungut pajak. Berdasarkan uraian diatas adapun kerangka pemikiran secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data diolah, 2017

Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan yang salah satunya merupakan pajak Daerah, pajak air tanah, pajak restoran, pajak reklame dan lain-lain. Dengan efektifnya pengelolaan pajak, maka

dihasilkan pendapatan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak asli daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Populasi merupakan sekelompok objek yang dapat dijadikan sumber penelitian. Menurut Sugiono (2006:72) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Penelitian ini merupakan penelitian populasi yang menganalisis penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010 hingga 2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut pendapat Sugiyono (2006:11) "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain". Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".

Penelitian yang menggunakan metode ini informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik. Selain itu, Bentuk desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *time series design*. *Time series design* adalah salah satu bentuk dari *desain quasi eksperimen* (*Quasi Experimental Design*).

Operasionalisasi Variabel

Tabel 1
Operasional variabel dan pengukurannya

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak Daerah	Pajak atas peneyelenggaraa n pajak Daerah (Siahaan, 2005: 323)	Efisiensi (<i>Efficiency</i>): Alat yang dapat digunakan untuk mengukur hasil realisasi pajak untuk menutup biaya pemungutan yang bersangkutan. (Halim, 2002:130)	Efisiensi pajak Daerah tahun 2010-2016	Ratio
			Biaya Pemungutan pajak Daerah tahun 2010-2016	Ratio
		Efektivitas (<i>Effectivity</i>): Perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya. (Simanjuntak dalam Halim, 2004:93)	Realisasi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016	Ratio
			Efektivitas pajak Daerah tahun 2010-2016	Ratio
Pendapat an Asli Daerah (PAD)	Pendapatan daerah yang diperoleh dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturanbperundang-undangan. (UU Nomor 33 tahun 2004 Pasal	Kontribusi Pajak Daerah: Besarnya sumbangan dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah dan PAD (Daud dalam Halim, 2002:163)	Realisasi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016	Ratio
			Target penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016	Ratio
			Kontribusi pajak Daerah terhadap pajak daerah tahun 2010-2016	Ratio

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
	1 Ayat 18)		tahun 2010-2016	
			Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2010-2016	Ratio
			Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2016	Ratio

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Proses analisis data penelitian umumnya terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap persiapan, analisis deskriptif dan pengujian hipotesis (Indrianto dan Soepomo, 2002:166). Analisis deskriptif dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan pajak Daerah dan pendapatan asli daerah, sedangkan analisis kuantitatif dalam perhitungan rumus perpajakan dipergunakan untuk mengetahui penerimaan pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi selama tujuh tahun pengamatan yaitu tahun anggaran 2010 sampai dengan 2016.

HASIL DAN ANALISIS

Deskriptif Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Perubahan struktur organisasi bertujuan untuk mengadakan penyempurnaan, hal ini tersusun dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi secara teknis administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati Bekasi serta mempunyai tugas mengambil Sumber Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 – 2014 Kabupaten Bekasi.

1. Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010 - 2016.

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Pajak Daerah sangat berpotensi untuk menunjang pendapatan daerah guna melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan. Berikut merupakan target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi. Berikut ini tabel mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2010 - 2016 sebagai berikut:

Tabel 2
Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010 - 2016
Kabupaten Bekasi (Rupiah)

Periode	Target	Realisasi
2010	124.800.000.000	116.873.915.640
2011	336.706.780.000	418.894.443.644
2012	449.500.080.000	539.342.449.537
2013	744,457,000,000	841.506.158.716
2014	892.007.000.000	1.113.294.365.232
2015	1.132.302.000.000	1.378.570.537.096
2016	1.403.117.500.000	1.436.289.721.728

Sumber : Data diolah, 2017

Tabel 3
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2010 - 2016
Kabupaten Bekasi (Rupiah)

Tahun	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2010	93,64 %	Efektif

Tahun	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2011	123,41 %	Sangat Efektif
2012	119,98 %	Sangat Efektif
2013	111,11 %	Sangat Efektif
2014	109,09 %	Sangat Efektif
2015	121,75 %	Sangat Efektif
2016	102,36 %	Sangat Efektif
Rata-Rata	114,29%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3 diatas pada tahun 2010 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 93,64 % dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2011 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 123,41 % dengan kriteria sangat efektif, tahun 2012 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 119,98 % dengan kriteria sangat efektif, tahun 2013 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 111,11 % dengan kriteria sangat efektif, tahun 2014 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 109,09 % dengan kriteria efektif, tahun 2015 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 121,75 % dengan kriteria efektif tahun 2016 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 102,36 % dengan kriteria sangat efektif.

2. Perhitungan Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010 - 2016.

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, juga memperhitungkan biaya tidak langsung. Biaya-biaya tidak langsung mencakup waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor departemen atau lembaga lain yang digunakan untuk membantu kegiatan memungut pajak, biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat dan lain sebagainya.

Tabel 4
Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Biaya Pemungutan Kabupaten
Bekasi Tahun 2010 s/d 2016 (Rupiah)

Tahun	Perolehan Pajak Daerah	
	Realisasi	Biaya Pemungutan
2010	258.773.032.129	255.211.990.995
2011	418.894.443.644	321.460.487.763
2012	539.342.449.537	265.148.331.233
2013	841.506.158.716	314.840.995.204
2014	1.113.294.365.232	428.732.477.117
2015	1.378.570.537.096	66.214.118.476
2016	1.436.289.721.728	90.764.558.745

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2017

Adapun kriteria penilaian efisiensi penerimaan pajak Daerah, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut :

Tabel 5
Tingkat Efisiensi Pajak Daerah Tahun 2010 - 2016
Kabupaten Bekasi (Rupiah)

Tahun	Tingkat Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2010	98,62%	Sangat Tidak Efisien
2011	76,74 %	Tidak Efisien
2012	49,16 %	Cukup Efisien
2013	37,41 %	Efisien
2014	38,51 %	Efisien
2015	4,80%	Sangat Efisien
2016	6,32%	Sangat Efisien
Rata-Rata	44,51%	Cukup Efisien

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas pada tahun 2010 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 98,62% dengan kriteria sangat tidak efisien, pada tahun 2011 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 76,74 % dengan kriteria tidak efisien, tahun 2012 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 49,16% dengan kriteria cukup efisien, tahun 2013 tingkat efisiensi pajak

Daerah sebesar 37,41 % dengan kriteria efisien, tahun 2014 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 38,51 % dengan kriteria efisien, tahun 2015 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 4,80% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2016 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 6,32% dengan kriteria sangat efisien.

3. Perhitungan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 - 2016.

Cara untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan analisis yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat dijabarkan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 6
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 - 2016 (Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Pendapatan Asli Daerah
2010	258.773.032.129	68.033.758.376	24.248.217.129	49.515.206.978	258.671.098.123
2011	418.894.443.644	87.801.046.425	30.137.542.965	62.237.097.815	599.070.130.849
2012	539.342.449.537	127.374.748.853	38.502.241.331	96.633.466.146	801.852.905.867
2013	841.506.158.716	113.774.547.036	45.468.670.485	153.775.932.914	1,154,525,309,151
2014	1.113.294.365.232	207.275.680.214	53.030.072.456	174.187.431.480	2.318.302.208.248
2015	1.378.570.537.096	191.597.848.346	45.700.216.086	227.968.308.756	1.843.836.910.285
2016	1.436.289.721.728	83.602.222.383	12.289.820.024	370.571.465.213	1.607.359.410.491

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2017

Berdasarkan perhitungan di atas, maka tingkat kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7
Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2010 - 2016 Kabupaten Bekasi (Rupiah)

Tahun	Tingkat Kontribusi	Kriteria
2010	1 %	Sangat Kurang
2011	0,69 %	Sangat Kurang
2012	0,67 %	Sangat Kurang
2013	0,73 %	Sangat Kurang
2014	0,48 %	Sangat Kurang
2015	0,74 %	Sangat Kurang
2015	0,89 %	Sangat Kurang
Rata-Rata	0,74%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7 diatas pada tahun 2010 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 1% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2011 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,69 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2012 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,67 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2013 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,73 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2014 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,48 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2015 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,74 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2016 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,89 % dengan kriteria sangat kurang.

Pembahasan

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak Daerah dengan potensi/target Pajak Daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 tingkat efektivitas pajak Daerah adalah sebesar 93,64 %,

Endi Rustendi

tahun 2011 tingkat efektivitas pajak Daerah meningkat menjadi sebesar 123.41 %, tahun 2012 efektivitas pajak Daerah menurun sebesar 119,98%, tahun 2013 tingkat efektivitas pajak Daerah menurun menjadi 111,11 %, hal ini menurut hasil wawancara dengan Petugas Dinas Pendapatan Daerah, SAP (Pelaksana Teknis) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi menjelaskan efektifitas penerimaan pajak Daerah setiap tahun mengalami penurunan, hal itu disebabkan belum optimalnya penggalan potensi pajak Daerah.

Penelitian Efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Udjianto (2010), Nugroho (2011), Ebtawan (2012), dan Hakim (2013) mereka meneliti ditempat yang berbeda yaitu Yogyakarta, Wonogiri, Madiun dan Tasikmalaya. Mereka baru meneliti tentang pajak daerah belum meneliti tentang masing-masing jenis pajak daerah seperti pajak Daerah, padahal pajak Daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Ada satu penelitian yang sudah meneliti tentang analisis efisiensi dan efektivitas pajak hotel, pajak Daerah dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu penelitian dari Sulistyawati (2008). Akan tetapi ada keterbatasan dalam penelitian Sulistyawati (2008), yaitu dalam penelitian tersebut melakukan perhitungan efektivitas pajak hotel, pajak Daerah dan pajak restoran daerah sedangkan penulis melakukan penelitian ini dengan hanya jenis pajak Daerah.

Berdasarkan tabel 5 tentang tingkat efisiensi penerimaan pajak Daerah tahun 2010 - 2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan biaya pemungutan dengan realisasi pajak Daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 tingkat efisiensi pajak Daerah adalah sebesar 98,62 %, tahun 2011 tingkat efisiensi pajak Daerah meningkat menjadi sebesar 76,74 %, tahun 2012 efisiensi pajak Daerah meningkat sebesar 49,16 %, tahun 2013 tingkat efisiensi pajak Daerah meningkat menjadi 37,41 %, hal ini menurut hasil wawancara dengan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi menjelaskan efisiensi biaya pemungutan sangat efisien,

Endi Rustendi

petugas pemungutan pajak Daerah sudah optimal dalam menjalankan semua tanggungjawab dengan baik. Pada tahun 2014 tingkat efesiensi pajak Daerah kembali menurun sebesar 38,51 %, pada tahun 2012 tingkat efesiensi pajak Daerah mengalami peningkatan sangat signifikan menjadi 4,80 %, serta pada tahun 2016 sebesar 6,32% kriteria sangat efisien. Pada tahun 2015 kabupaten bekasi melakukan pemerakan terhadap dinas pendapatan, keuangan dan aset daerah menjadi dua dinas, dari hal tersebut maka nilai pengeluaran yang dikeluarkan oleh dinas pendapatan jauh menjadi lebih kecil.

Berdasarkan uraian tersebut tingkat efektifitas, efesiensi sudah sangat baik namun kontribusi sangat kurang, hal tersebut mempunyai beberapa kendala atau faktor penghambat terjadinya penerimaan Pajak Daerah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah karena pada tahun 2012 merupakan karena kurang optimalnya kinerja pemungutan pajak Daerah;
- b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan susah menghitung dan melaporkannya.
- c. Terdapat banyak data yang diperoleh oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi yang tidak akurat karena ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal ini menghambat Kerja Dinas untuk melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.
- d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi terhambat oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk mengawasi penerimaan Pajak Daerah oleh wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak Daerah dengan potensi/target Pajak Daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 93,64 % dengan kriteria sangat efektif, pada tahun 2011 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 123,41 % dengan kriteria sangat efektif, tahun 2012 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 119,98 % dengan kriteria sangat efektif, tahun 2013 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 111,11 % dengan kriteria sangat efektif, tahun 2014 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 109,09 % dengan kriteria efektif, tahun 2015 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 121,75 % dengan kriteria efektif tahun 2016 tingkat efektifitas pajak Daerah sebesar 102,36 % dengan kriteria sangat efektif.
2. Bahwa tingkat efisiensi penerimaan pajak Daerah tahun 2007-2014 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan biaya pemungutan dengan realisasi pajak Daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 98,62% dengan kriteria sangat tidak efisien, pada tahun 2011 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 76,74 % dengan kriteria tidak efisien, tahun 2012 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 49,16% dengan kriteria cukup efisien, tahun 2013 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 37,41 % dengan kriteria efisien, tahun 2014 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 38,51 % dengan kriteria efisien, tahun 2015 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 4,80% dengan kriteria sangat efisien, tahun 2016 tingkat efisiensi pajak Daerah sebesar 6,32% dengan kriteria sangat efisien.
3. Kontribusi penerimaan pajak Daerah tahun 2007-2014 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan realisasi pajak Daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 kontribusi pajak Daerah terhadap

pendapat asli daerah sebesar 1% dengan kriteria sangat kurang, pada tahun 2011 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,69 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2012 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,67 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2013 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,73 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2014 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,48 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2015 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,74 % dengan kriteria sangat kurang, tahun 2016 kontribusi pajak Daerah terhadap pendapat asli daerah sebesar 0,89 % dengan kriteria sangat kurang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diperoleh maka saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi harus berupaya lebih giat lagi dalam menggali potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan efektifitas, efisien dan kontribusi pajak Daerah terhadap PAD.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi harus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang akan membayar pajak agar masyarakat merasakan kemudahan dalam pembayaran pajaknya dan tidak ada lagi wajib pajak yang kewajibannya menunggak.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi harus lebih mengoptimalkan lagi kinerja dalam penerapan strategi pemungutan pajak Daerah agar pemungutan pajaknya efektif dan efisien serta kontribusi terhadap PAD semakin meningkat di Kabupaten Bekasi.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi harus teliti dalam melakukan perhitungan potensi pajak Daerah agar sesuai dengan potensi yang benar-benar ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 200., *Pengertian Tentang Efektifitas*, (Online), Tersedia :http://othenk.blogspot.com/2008_2008_11_01_archive.html.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Edisi Revisi V, PT Rineka Cipta.
- Barnard, I, Chester. 1992. *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses*, Jakarta: Gramedia.
- Ebtawan, Junius Nanda Purna. 2012. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011*
- Etzioni, Amitai. 1982, *Organisasi-Organisasi Modern*, Terjemahan Suryatim, Jakarta : UI Press.
- Febri Adhi Nugroho. 2011. *Analisis Tingkat Efektivitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri)*.
- Ferida Sulistyawati. 2008. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*, E-Library Universitas Brawijaya, Malang
- Hakim, Vita Amaliah. 2013. *Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____.2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handyaningrat, Soewarno.1994. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : NV. Sapdodadi.
- Hasibuan, Malayu. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Haji Masagung.
- . 2004. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksar.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaruan*, Yogyakarta: PT. Grasindo.
- Komaruddin. 1994. *Esiklopedia Manajemen*, edisi kesatu, Bumi Aksara, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Martoyo, Susilo. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Prasetyo Budi Saksono, 1984.. *Dalam Menuju SDM Berdaya*.Bumi Aksara. Jakarta.

- Schermerhorn, John R., Jr. 1984. *Management for Productivity*. New York: John Willey & Sons Inc.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Statistik untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 1997. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produksi*, Yogyakarta; BPFE Universitas Gajah Mada.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Tika, Pabundu. 2008. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Udjianto, Didit Welly. 2007. Efisiensi Pajak Daerah suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005, *Jurnal Ekonomi Universitas Kristen Indonesia*, Jakarta
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.